

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sektor perbankan sangat berperan penting dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional, karena fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau sebagai perantara antara debitur dan kreditur, serta penyelenggara transaksi pembayaran. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 (Otoritas Jasa Keuangan, 1998): “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dengan kata lain, perbankan turut berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara dengan berkontribusi memberikan kredit bagi sektor-sektor yang membutuhkan dana.

Saat ini terdapat sekitar 58 juta kegiatan usaha secara mandiri (*self employed*), dan sekitar 1,65% penduduk Indonesia telah menjadi pengusaha (*entrepreneur*) yang dulunya berasal dari bisnis *start up* (pemula) dan mampu mengembangkan usahanya. Peran strategis UMKM dalam struktur perekonomian Indonesia makin nyata dimana sekitar 99,9% unit bisnis di Indonesia merupakan UMKM dan menyerap hampir 97% tenaga kerja Indonesia (Bahrul, 2016). Hal ini menunjukkan, bahwa sumber pendanaan yang berasal dari perbankan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu jenis perbankan memiliki peran dalam mendorong kemajuan pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mikro. Peran BPR dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia saat ini melalui peningkatan akses kredit atau pembiayaan dari perbankan.

Masalah yang sering terjadi dalam pemberian kredit yang menjadi momok bagi BPR adalah kredit bermasalah yaitu kredit macet. Beberapa dampak dari adanya kredit macet/bermasalah (NPL) adalah:

- Perputaran kas di dalam perusahaan perbankan menjadi terhambat dan Ketersediaan kas menurun.
- Laba perusahaan menurun apabila nasabah yang mengalami kredit macet/bermasalah tidak segera diatasi.
- Rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh.

Hal ini menunjukkan pengaruh pada kesehatan BPR yang dimana paling tragisnya nasabah tidak memiliki kepercayaan terhadap kinerja perbankan bersangkutan dan dapat membuat kelangsungan bank tersebut terancam.

PT. BPR NBP 25 Tembung merupakan salah satu badan usaha berbentuk bank perkreditan rakyat yang memiliki fungsi utama untuk menyimpan dan menyalurkan dana (kredit) kepada masyarakat di daerah Tembung. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

PT. BPR NBP 25 Tembung juga mengalami masalah klasik yang dihadapi BPR-BPR pada umumnya, yaitu kredit bermasalah. Di PT. BPR NBP 25 Tembung itu sendiri tingkat kredit bermasalah atau macet meningkat. Hal ini bisa dilihat dari Loan to Deposit Ratio (LDR), total kredit macet dan Non Performing Loan (NPL) yang ada pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Data LDR, Total Kredit Macet dan NPL PT. BPR NBP 25 Tembung Tahun 2014-2016

Tahun	Loan to Deposit Ratio (LDR)	Total Kredit Macet	Non Performing Loan (NPL)
2014	83,78 %	Rp 154.148. 200	0,8881 %
2015	67,62 %	Rp 73. 442. 300	2,48 %
2016	66,80 %	Rp 205. 297. 600	5,66 %

Sumber: PT. BPR NBP 25 Tembung

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persentase LDR dari tahun 2014 ke 2015 menurun dan begitu juga dari tahun 2015 ke 2016. Persentase NPL dari tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat dan dari tahun 2015 ke 2016 juga meningkat. Kenaikan NPL dari tahun 2014 sampai 2016 selalu naik hampir 2%. Pada tahun 2016 tingkat NPL di BPR NBP 25 Tembung menunjukkan, NPL sudah melewati batas yang sudah ditentukan. Bank Indonesia menetapkan batas untuk NPL BPR adalah 5%(Bank Indonesia, 2015).

Untuk mencegah risiko-risiko kredit macet yang dapat menghambat operasional BPR maka perusahaan sangat diperlukan untuk memperhatikan efektivitas struktur pengendalian internal di BPR tersebut. Risiko-risiko dapat dihindari atau diminimalkan dengan melaksanakan struktur pengendalian internal

secara konsisten. Jika struktur pengendalian internal yang dimiliki memadai dalam pemberian kredit maka pelaksanaan pemberian kredit dapat terkendali dan mampu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan bank.

Dari keterangan tersebut penulis tertarik untuk membahas atau menganalisis efektivitas sistem pengendalian internal pemberian kredit di PT. BPR NBP 25 Tembung dengan judul: **“Analisa Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. BPR NBP 25 Tembung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah sistem pengendalian internal pemberian kredit pada BPR NBP 25 Tembung sudah sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian internal terhadap sistem pemberian kredit di PT. BPR NBP 25 Tembung sudah sesuai dengan unsur pengendalian internal menurut COSO serta memberikan masukan atau perbaikan yang mungkin bisa diterapkan terkait sistem pengendalian internal.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi BPR NBP 25 Tembung

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna untuk pihak BPR tentang sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit sebagai penilaian atau perbaikan yang mungkin bisa diterapkan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menambah wawasan, menerapkan serta mengembangkan pengetahuan yang didapat selama di perkuliahan dalam praktek mengenai sistem pengendalian internal pada BPR NBP 25 Tembung.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pembaca sebagai penambah pengetahuan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi dalam lingkup yang sama. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti lainnya dalam bidang pengendalian internal khususnya pengendalian internal pemberian kredit.

1.5. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisa terhadap sistem pengendalian internal pemberian kredit.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem pemberian kredit.